

Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Asli Daerah Maros Sulsel Rp92 Miliar hingga Mei 2024



Rapat pembahasan PAD di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan beberapa waktu.

Sumber:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/05/pendapatan-asli-daerah-maros-sulsel-rp92-miliar-atau-3259-persen-dari-target>

Hampir satu semester namun capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) baru mencapai 32.59 persen.

Kepala Bapenda Maros, Andi Baso Arman mengatakan dari target Rp283 miliar, realisasi hingga bulan ini baru mencapai Rp92 miliar.

Ia menyebutkan, dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD baru enam berhasil melampaui target 30 persen.

“Bapenda, Perikanan, PUPR, Dinas Kesehatan, DLH dan RSUD dr La Palaloi,” katanya, Rabu (5/6/2024).

Bapenda targetnya sebesar Rp180 miliar baru mencapai 30,87 persen atau Rp55 miliar.

Dinas Perikanan ditarget Rp850 juta berhasil mengumpulkan 37,30 persen atau Rp317 juta.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan ditarget Rp350 juta berhasil mengumpulkan 39,43 atau Rp138 juta.

Dinas Kesehatan ditarget Rp27 miliar berhasil mengumpulkan 36,35 persen atau Rp10 miliar.

RSUD dr La Palaloi baru Rp21 miliar atau 39,40 persen dari target Rp54 miliar.

Dinas Lingkungan Hidup Rp52 juta atau 34,93 persen dari target Rp150 juta.

Sementara kata dia masih ada empat OPD belum melampaui target 30 persen.

“Yang belum capai target Dinas Pertanian, Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dan Kopumdag,” sebutnya.

Kalau Dinas Pertanian baru menghasilkan Rp123 juta atau 20,57 persen dari target Rp600 juta.

Dinas Pariwisata berhasil mengumpulkan Rp1,7 miliar atau 24,67 persen dari target Rp7 miliar.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mengumpulkan Rp2,1 miliar atau 25,23 persen dari target Rp8,5 miliar.

Kemudian Kopumdag Rp766 juta atau 20,99 persen dari target Rp3,6 miliar.

Mantan Kadis Kominfo itu mengatakan kendala dihadapi Dinas Pariwisata adalah cuaca yang tidak menentu mengakibatkan pengunjung yang datang berkurang.

“Kalau Dinas Pertanian alsintan nya diperiksa oleh BPK sehingga kurang maksimal dalam meraih retribusi sewa alsintan,” katanya.

Sementara untuk Dinas Penanaman Modal masih kurangwarga yang mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung.

“Kopumdag banyak belum membayar sewa kios atau lods,” tutupnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Makassar bakal menerapkan sistem pembayaran [iuran sampah](#) menggunakan [QRIS](#).

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan memastikan retribusi [iuran sampah](#) dapat terserap dengan baik.

Apalagi, berdasarkan laporan yang diterima oleh Wali Kota Makassar, [Moh Ramdhan Pomanto](#), terdapat beberapa oknum RT/RW di Kota Makassar yang melakukan tilap [iuran sampah](#).

"QRIS kalau bisa," ungkap Danny Pomanto, sapaan akrabnya, saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis (20/6).

Nantinya, kata Danny, retribusi sampah juga akan dimasukkan dalam aplikasi PAKINTA. "Retribusinya nanti pakai Pakintaki," tambah Danny.

Diketahui sebelumnya, saat ini Pemerintah Kota Makassar tengah menggodok perubahan Perwali Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif [Retribusi Pelayanan Persampahan](#).

Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari 2024.

Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum akan membuat peraturan wali kota turunan dari Perda tersebut, menerapkan skema subsidi silang terkait retribusi sampah.

Tarif retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri akan dinaikkan menjadi Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Sementara itu, untuk kategori rumah tangga, tarif retribusi akan diturunkan menjadi di bawah Rp16 ribu.

Danny Pomanto menjelaskan retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri harus mendapat intervensi karena potensinya yang cukup besar dibandingkan dengan sampah rumah tangga.

"Dengan kenaikan tarif retribusi ini, ada potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar di tahun 2024," ujar Danny beberapa waktu lalu.

Pemkot Makassar menargetkan PAD 2024 mencapai Rp2 triliun. "Termasuk PAD Rp2 triliun, tadi kita hitung cuma 200 milyar, setengahnya saja 150 milyar sudah meledak PAD," terang Danny.

Untuk mencapai target tersebut, Danny meminta seluruh camat dan lurah di Kota Makassar untuk melakukan pendataan di wilayahnya yang memiliki potensi retribusi. (Shasa/B)

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/05/pendapatan-asli-daerah-maros-sulsel-rp92-miliar-atau-3259-persen-dari-target>
2. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/06/20/cegah-kebocoran-iuran-sampah-pemkot-makassar-bakal-terapkan-pembayaran-via-qris/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.